

DPRD Jabar Panggil Pihak Terkait Soal Nasib Kebun Binatang Bandung Pasca Kematian 2 Harimau

Kota Bandung, Prolite – Kematian dua anak harimau yang ada di Kebun Binatang Bandung, berbuntut panjang. DPRD Provinsi Jawa Barat memanggil pihak terkait untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, ada Memorandum Of Understanding (MOU) antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei mendatang. Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap kebun binatang Bandung pasca dicabutnya Lembaga Konservasi (LK) dari yayasan pengelola sebelumnya.

“April ini menjadi kunci bagaimana pemkot yang di dukung oleh Pemprov dan kementerian kehutanan serta DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bisa menentukan hewan-hewan itu tepat berada di kebun binatang Bandung atau hewan-hewan jenis tertentu yang di lindungi yang mendapatkan perhatian khusus dipindahkan ke lembaga konservasi lainnya di sekitar Jawa Barat, sekitar Bandung dan kementerian siap untuk itu,” Ujar Ono usai rapat dengan BKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).

Baca Juga: 2 Anak Harimau Benggala Mati, BBKSDA Buka Suara Penyebab Kematian

Karena itu, lanjut Ono, pihaknya mengajak pihak yang terkait dengan persoalan ini untuk kembali duduk bersama dan menuntaskan persoalan mulai dari keberlangsungan hewan-hewan di Kebun Binatang Bandung dan yang tidak kalah penting yakni persoalan kejelasan status karyawannya. Sebab, keberlangsungan hewan-hewan itu juga bergantung kepada karyawan atau petugas kebun binatang.

“Dua hal ini kan harus menyatu yang mengurus satwa ini juga orang nih pegawai pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas gajinya tidak jelas pasti akan berpengaruh maka

DPRD Jabar Panggil Pihak Terkait Soal Nasib Kebun Binatang Bandung Pasca Kematian 2 Harimau

tanggung jawab pemkot untuk segera menyelesaikan masalah kepegawaian yang katanya mau diangkat sebagai tenaga hari aja cepat dilakukan, nah makannya hari ini kita tunggu nih berdasarkan informasi, Wali Kota Bandung akan menentukan pimpinan sementara, pimpinan kayawan disana karena selama ini kan tidak ada yang menjadi ketua lah disana sehingga melakukan koordinasi dengan BKSDA dengan yang lain juga tidak berjalan dengan baik ya kita tunggu,” kata Ono.

Agar berimbang, tambah Ono, kalangan awak media juga harus menggali informasi terkait dengan tanggung jawab dari Pemkot Bandung terkait dengan kepegawaian dan pengelolaan perkara utuh terkait dengan Kebun Binatang Bandung tersebut. Dalam hal ini, Walikota Bandung harus secepat mungkin untuk merespon melalui keputusan dan kebijakan yang tepat.

Baca Juga: Kondisi 711 Satwa Kebun Binatang Bandung Beraktivitas Normal dan Pakan Terpenuhi

“Walikota Bandung, Pak Farhan segera harus sat set jangan sampe berlarut-larut karena yang tidak sat set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung satwanya apalagi ya kan, jadi harus sat set nih pak farhan itu saja sebenarnya simpel karna kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU, makannya tadi kementrian jangan salahkan kementrian salahkan juga pemkot,” pungkas Ono.



Baca Selanjutnya
6 Fakta di Balik Film 'Project Hail Mary' : Lebih dari Sekadar Sci-Fi Biasa